



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DJOKO SASONO
2. Jabatan : SEKRETARIS JENDERAL
3. NHK : 96827

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 5.600.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 118 m2/45 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. Tanah Seluas 14500 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Bangunan Seluas 29 m2 di KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 670 m2/350 m2 di KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 389 m2/200 m2 di KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 170.250.000

1. MOBIL, VW BEETLE SEDAN Tahun 1974, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
2. MOBIL, NISSAN JUKE SEDAN Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. LAINNYA, --- (SEPEDA) SEPEDA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 250.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 50.000.000**D. SURAT BERTHARGA** Rp. 1.460.000.000**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 9.508.398.789**F. HARTA LAINNYA** Rp. 1.589.342.645

Sub Total Rp. 18.377.991.434



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 18.377.991.434

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.